

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini perkembangan teknologi semakin meningkat kecanggihannya sudah tidak dapat dipungkiri, banyak negara di belahan dunia ini baik Asia maupun Eropa yang mengembangkan kualitas teknologinya agar semakin mempermudah suatu aktivitas atau kegiatan sehari-hari penggunaannya pun semakin dapat di akses oleh semua kalangan baik media elektronik maupun informasi, perkembangan teknologi yang semakin canggih sangat dirasakan di berbagai bidang pekerjaan.

Aktivitas birokrasi yang kerap diterapkan oleh banyak perusahaan swasta atau negeri sebagai bentuk tata kelola organisasi dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan dalam aktivitas birokrasi tersebut seringkali harus melalui tahapan-tahapan yang membutuhkan waktu lebih lama. Seperti permasalahan absensi kehadiran seorang pegawai di kantor melaksanakan pendataan absensi kehadiran secara manual menggunakan fasilitas kantor seadanya hal ini tentunya dilaksanakan sebelum berkembang pesatnya teknologi.

Sebelum era reformasi pemerintah belum banyak menciptakan regulasi terhadap kegiatan pengelolaan administrasi, oleh sebab itu aktivitas birokrasi berbelit-belit banyak diterapkan di berbagai instansi swasta atau negeri namun sejak era reformasi pemerintah melaksanakan pembaharuan-pembaharuan terhadap kegiatan pengelolaan administrasi.

Awal mula teretusnya konsep *good governance* pada sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu *good governance* merupakan alat reformasi sistem pemerintahan Indonesia yang mutlak demi terciptanya proses demokrasi yang bersih, seperti yang tertuang pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan terkait prinsip *good governance*, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertulis asas umum mengenai pengelolaan Pemerintah Daerah yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan efektivitas¹.

Asas-asas tersebut tercantum sebagai prinsip *good governance* oleh sebab itu konsep *good governance* ini dinyatakan solid sebagai upaya menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, praktis, dan transparan kepada masyarakat sehingga tercipta demokrasi yang bersih pada aktivitas penyelenggaraan Negara khususnya pada pengelolaan administrasinya.

Konsep *good governance* juga memangkas kegiatan birokrasi yang dinilai tidak efektif dan efisien terhadap waktu mengacu kepada konsep *good governance* kemajuan teknologi menjadi media bagi pemerintah menciptakan

¹ Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah*

regulasi pada sistem pengelolaan administrasi di Indonesia terutama pada kasus permasalahan pendataan terkait absensi kehadiran pegawai di instansi swasta atau negeri.

Instruksi presiden no. 3 tahun 2003 merupakan awal mula perkembangan *e-government* di Indonesia ditunjukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien peraturan *e-government* merupakan cara mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi konsep *e-government* membuat proses pengelolaan di setiap perusahaan menjadi mudah untuk di akses.

Ketepatan waktu pegawai dalam bekerja merupakan hal terpenting yang harus ada di dalam diri seorang pegawai setiap perusahaan. agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya kedisiplinan pegawai terhadap waktu jam kerja mempengaruhi kualitas dari terselenggaranya kegiatan perusahaan secara lebih efektif dan efisien maka dari itu untuk pengelolaan absensi pegawai di setiap perusahaan seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Berawal dengan secara manual absensi pegawai dilakukan cukup dengan menulis nama dan tanda tangan di daftar absensi yang sudah dibuat namun cara tersebut dirasa kurang efisien terhadap waktu dan menimbulkan resiko manipulasi absensi seiring dengan perkembangan teknologi pada era

itu teknologi dimanfaatkan setiap perusahaan untuk membantu jalannya pengelolaan kegiatan perusahaan, lalu mesin absensi sidik jari atau *finger print* yang menjadi pembaharuan cara absensi pegawai.

Melalui mesin absensi *finger print* atau sidik jari cara absensi pegawai hanya dengan menempelkan jari pada mesin scan sidik jari tersebut pegawai sudah terhitung secara otomatis kehadirannya mesin *finger print* ini juga terhubung langsung pada sistem komputer perusahaan agar data kehadiran pegawai dapat diakumulasikan secara cepat dan akurat.

mesin absensi *finger print* memiliki kelebihan diantaranya antisipasi kecurangan pegawai dalam hal data kehadiran dikantornya, menghemat waktu dan data kehadiran pegawai kantor dapat terdata secara langsung, namun di sisi lain kekurangan dari mesin absensi *finger print* ini adalah biaya, setiap perusahaan harus menegeluarkan anggaran untuk pembelian dan perawatan mesin tersebut tidak sedikit juga sistem absensi mesin *finger print* masih manghadirkan kasus manipulasi karna kurangnya pengawasan dari penggunaan mesin absensi.

Di ndonesia virus *covid* mulai meluas penyebarannya tepatnya sejak dari bulan Maret 2020. Sesuai data dari covid19.go.id terlihat jumlah masyarakat yang positif terpapar Covid-19 per tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 1.528 orang dengan rincian 81 orang dinyatakan sembuh dan 136 orang meninggal dunia. Berhubungan dengan data tersebut dapat kita amati tentang percepatan Covid-19 dalam menjangkit manusia. Dirumuskan dari awal bulan Maret hanya 2 orang yang terpapar Covid-19 hingga akhir bulan

Maret virus tersebut telah menyebar dan menjangkit ribuan warga Indonesia. kemudian hal tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19² dari adanya persoalan wabah virus covid pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) kebijakan ini sebagai strategi pemerintah untuk menekan penyebaran virus covid-19 tanpa harus melakukan *lockdown* yang berpotensi mengganggu perekonomian Negara, PSBB mulai berlaku di berbagai daerah pada awal April 2020, ketika kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus lebih dari 1.000 kasus.

Dibuatnya peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020 oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mempunyai pasal 28 serta membahas seluruh kegiatan di ibu kota, yakni kegiatan perekonomian, social budaya, keagamaan, dan Pendidikan. Pada tanggal 10-23 april 2020 diterapkannya PSBB untuk yang pertama kalinya³. Dari munculnya kebijakan tersebut pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar melakukan segala aktivitas hanya dari rumah saja tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kontak manusia terlebih lagi berda di suatu kerumunan.

Dapat ditemukan jutaan bakteri yang dapat menempel di tangan.

Diperkirakan setiap 1 cm persegi kulit di tangan dijumpai 1.500 bakteri.

² <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-government-sebagai-strategi-dalam-meminimalisasi-penyebaran-covid-19-dan-efektivitas-pelayanan-publik> di akses pada tanggal 31 maret 2021 pada pukul 18.17 wib

³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/15520211/setahun-covid-19-kebijakan-psbb-dikenalkan-sebagai-solusi-tekan?page=all> diakses pada tanggal 1 april 2021 pada pukul 15.04 wib

Sementara itu, lipatan kulit di tangan dan di bawah kuku merupakan tempat persembunyian bakteri yang paling umum. Bisa disimpulkan bahwa ditelapak tangan kita banyak mengandung bakteri karena telapak tangan sering bersinggungan dengan berbagai benda, mengapa demikian? tentunya karena kita sering melakukan aktivitas dengan memegang suatu benda.

Bukan bakteri saja, virus juga dapat menyerang tubuh melewati telapak tangan. Tepat dari berbagai sumber, salah satu cara pencegahan *virus covid-19* ialah menjaga kebersihan tangan serta menjauhi memegang barang-barang yang dapat menularkan *virus*

Di perusahaan setidaknya puluhan sampai ratusan pegawai menggunakan mesin absensi sidik jari itu berpotensi jari terkontaminasi virus dan bakteri berbahaya, maka dari itu pemakaiannya harus diawasi. Dengan demikian, diterapkannya new normal di dari bulan juni mendatang masyarakat dilarang tidak mematuhi penyebaran *virus covid-19*. Penyebaran tersebut mesti dijadikan sorotan utama dari setiap perusahaan guna mempertahankan produktivitas perusahaan, serta apabila penggunaan mesin *fingerprint* menjadi pemicu penyebaran virus, dengan itu perusahaan akan mengalami kerugian karena mengganggu aktivitas perusahaan, dipandang tidak becus oleh pemerintah dan kemungkinan akan diberikan sanksi atas ketidak becusan tersebut.⁴

⁴ <https://reprime.id/article/new-normal-hatihati-absen-pakai-sidik-jari> diakses pada tanggal 23 maret 2022, pukul 14:39 wib

Untuk siswa dan mahasiswa melakukan pembelajaran secara daring atau *online* begitu pula semua pegawai di setiap perusahaan baik negeri atau swasta di himbau untuk *work from home (WFH)* atau bekerja dari rumah hal ini membuat segala bentuk kegiatan dan tugas-tugas dilakukan secara *online* yang pastinya membutuhkan saluran internet. Pada akhirnya masyarakat melakukan Kegiatan seperti rapat atau suatu diskusi tertentu dilakukan dengan menggunakan aplikasi tatap muka yaitu seperti *zoom meeting, google meeting* dan lain sebagainya tak terkecuali persoalan absensi kehadiran untuk kelompok siswa dan mahasiswa menggunakan web sekolah dan kampus sebagai sarana mereka melakukan absensi kehadiran.

Berbeda halnya dengan pelajar saat PSBB berlangsung pegawai kantor dijadwalkan sebagian pegawai masuk kantor dan sebagiannya bekerja secara dari rumah pegawai yang hadir dikantor dapat melakukan absensi seperti biasa dengan absensi mesin *finger print* sedangkan pegawai yang bekerja dari rumah melakukan absensi kehadiran secara online, web atau aplikasi absensi online yang disediakan oleh instansi agar pegawai yang bekerja dari rumah tetap dapat melakukan absensi kehadiran secara efektif dan terhubung dengan adanya virus covid-19 absensi online dinilai lebih meminimalkan penyebaran virus.

Melihat dari kondisi yang ada sistem absensi online cukup efektif dalam meminimalkan penyebaran virus karena sistemnya yang dilakukan menggunakan *gadget* masing-masing, berbeda dengan absensi mesin

fingerprint yang mengharuskan menyentuh satu mesin yang dipergunakan oleh banyak orang dan tidak dapat dikontrol kebersihannya.

Sesudah dua bulan kebijakan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia, sesuai dengan keputusan Kementerian Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/328/2020 yang membahas terkait pencegahan dan pengendalian covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industry dalam mendukung keberlangsungan usaha ⁵Pemerintah mulai melakukan kebijakan *new normal*. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, *new normal* adalah perubahan sikap dengan tetap menjalankan aktivitas normal akan tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Segala aktivitas baik ekonomi, ibadah, maupun sosial sudah mulai melakukan persiapan mendekati keadaan *new normal* agar tetap produktif. ⁶

Pada keadaan *new normal* perkembangan penyebaran virus covid-19 masih naik turun di Indonesia oleh karena itu sistem absensi *online* banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan kepada pegawainya yang bekerja secara dari rumah dan beberapa perusahaan masih menggunakan sistem absensi *fingerprint* dengan tetap menjalani protokol kesehatan. Sama seperti instansi Negara lainnya yang sangat ketat melakukan protokol kesehatan pada masa *new normal* sebagai langkah memutus rantai penyebaran covid-19 di kementerian koperasi dan ukm menerapkan dua sistem kehadiran pegawai absensi *fingerprint* dan absensi *online*.

⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/328/2020

⁶ <https://www.djkn.kemken.go.id/kpknl-palangkaraya/baca-artikel/13208/Beradaptasi-dengan-Tatanan-Normal-Baru-New-Normal.html> diakses pada tanggal 1 april 2021 pada pukul 15.44 wib

Jumlah pegawai ASN di kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 sebanyak 2.070 pegawai pada saat new normal diterangkan pegawai 50% bekerja secara WFH dan 50%nya lagi bekerja secara WFO⁷ tabel penggunaan absensi sistem *fingerprint* dan sistem *online* di kementerian Koperasi dan UKM pada beberapa bulan sebagai berikut:

Jumlah pegawai	Bulan Januari	Bulan Febuari	Bulan Maret
1.035 pegawai (PNS)	Pegawai bekerja dari rumah Absensi <i>online</i>	Pegawai masuk kantor Absensi <i>fingerprint</i>	Pegawai bekerja dari rumah Absensi <i>online</i>
1.035 pegawai (NON PNS)	Pegawai masuk kantor Absensi <i>fingerprint</i>	Pegawai bekerja dari rumah Absensi <i>online</i>	Pegawai masuk kantor Absensi <i>fingerprint</i>

Sumber Data: Berita Liputan 6

Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap keefektifan sistem absensi mesin *finge print* dan sistem absensi *online* di masa *new normal* dalam hal ini penulis mengangkat judul : “Analisis Komparatif Penerapan Absensi *FingerPrint* Dengan Absensi *Online* di masa *new normal* (Studi Kementerian Koperasi dan UKM)”

⁷ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4501179/2070-asn-kementerian-koperasi-dan-ukm-disuntik-vaksin-covid-19> diakses pada tanggal 5 april 2021 pukul 22.41 wib

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian yaitu. Bagaimana Analisis Komparatif Penerapan absensi *fingerprint* dengan absensi *online* pada masa *new normal* (Studi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana Analisis Komparatif Absensi *Fingerprint* dengan Absensi *Online* di Masa *New Normal* (Studi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu karya ilmiah dalam studi Ilmu Administrasi Publik yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pendukung maupun referensi bagi penyusun lainnya yang hendak melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengenai keefektivan sistem absensi pegawai

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi 5 bagian, dengan harapan lebih mudah dipahami, adapun sistematikanya ialah :

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka ini menjelaskan teori dan konsep serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penulis.

3. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian, berisikan metode penelitian yang penulis pakai, analisis data penelitian, dan interpretasi hasil penelitian sebagai hasil penelitian.

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan deskripsi umum, sejarah singkat serta diteruskan dengan mendeskripsikan tentang hasil pengamatan di lapangan.

5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.